

CONTRACTS

kk

Dag 04/02

Ret

P

SKRIPSI

HANY RETNAWATI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMESAN DALAM
PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN KAPAL**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMESAN DALAM
PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN KAPAL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.

NIP. 130 675 526

Penyusun,



Hany Retnawati

NIM. 039814661

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Menurut sifat pekerjaannya, perjanjian pembangunan kapal termasuk dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yang diatur dalam pasal 1601 b BW dan pasal 1604-1616 BW. Dari segi lain perjanjian pembangunan kapal dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli kapal yang masih harus dibuat. Dalam menentukan isi perjanjian, pihak pemborong dan pihak pemesan dapat menentukan sendiri isi perjanjian tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dinyatakan pasal 1338 (1) BW, tetapi kebebasan berkontrak itu dibatasi oleh persyaratan dalam pasal 1320 no 4 BW dan pasal 1335 BW, serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam pembangunan kapal.
- b. Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan kapal, dimana bentuknya adalah *standart kontrak*, maka isi kontrak tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak pembuat kontrak (pemborong). Pemesan sebagai pihak yang dirugikan apabila pemborong wanprestasi juga harus mendapat perlindungan hukum. Dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemborong, maka upaya penyelesaian yang terlebih dahulu ditempuh adalah musyawarah. Bila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka upaya terakhir adalah gugatan ke pengadilan negeri.